



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPELITBANGDA)
TAHUN 2026**

Sarilamak, 30 Desember 2025

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-8
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-19
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
3.3 Program dan Kegiatan	III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Catatan Penting	V-1
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3 Rencana Tindak Lanjut	V-2



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	I-2
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda dan Pencapaian Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota	II-11
Tabel 2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-22
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-51
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda pada Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap PD	III-5
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan	III-8
Tabel 3.4. Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Penelitian dan Pengembangan	III-10
Tabel 3.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Pendukung Prioritas Kabupaten	III-11
Tabel 3.6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota	III-12
Tabel 4.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-2
Tabel 4.2. Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-18



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004	I-8



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap PD diwajibkan untuk menyusun Renja PD yaitu dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Bappelitbangda sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.

Berikut adalah tabel penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:



- I. Persiapan Penyusunan Renja Bappelitbangda, dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2024.
 2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada awal bulan Desember 2024, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Renja Bappelitbangda oleh tim penyusun hingga batas waktu penyampaian pada tanggal 21 Februari 2025. Penyusunan Renja Bappelitbangda berpedoman pada Renstra Bappelitbangda tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Renja Bappelitbangda tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Bappelitbangda tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Bappelitbangda mencakup analisis gambaran pelayanan Bappelitbangda dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran PD;
- d. Renja dan Pendanaan PD; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja Bappelitbangda merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Bappelitbangda berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja Bappelitbangda dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/forum Bappelitbangda. Kemudian rancangan Renja PD kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi RKPD. Penyusunan Rancangan Renja Bappelitbangda dimulai proses penyusunannya pada minggu ke-4 Februari 2025. Kemudian, Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan ranwal RKPD.

IV. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

Forum PD/Lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum Bappelitbangda dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran



yang telah disusun dalam rancangan Renja PD. Hasil pelaksanaan Forum PD/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.

Forum Bappelitbangda dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2025 di Aula Lantai I Bappelitbangda yang dihadiri oleh seluruh PD di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan lainnya yang dihadiri secara luring (*offline*) dan daring (*online*).

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappelitbangda dimulai pada bulan Juli 2025 dan diserahkan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.

VI. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja PD yang telah disampaikan kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda diverifikasi untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja PD lainnya. Apabila dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada PD. Kepala PD kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut dan disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda.

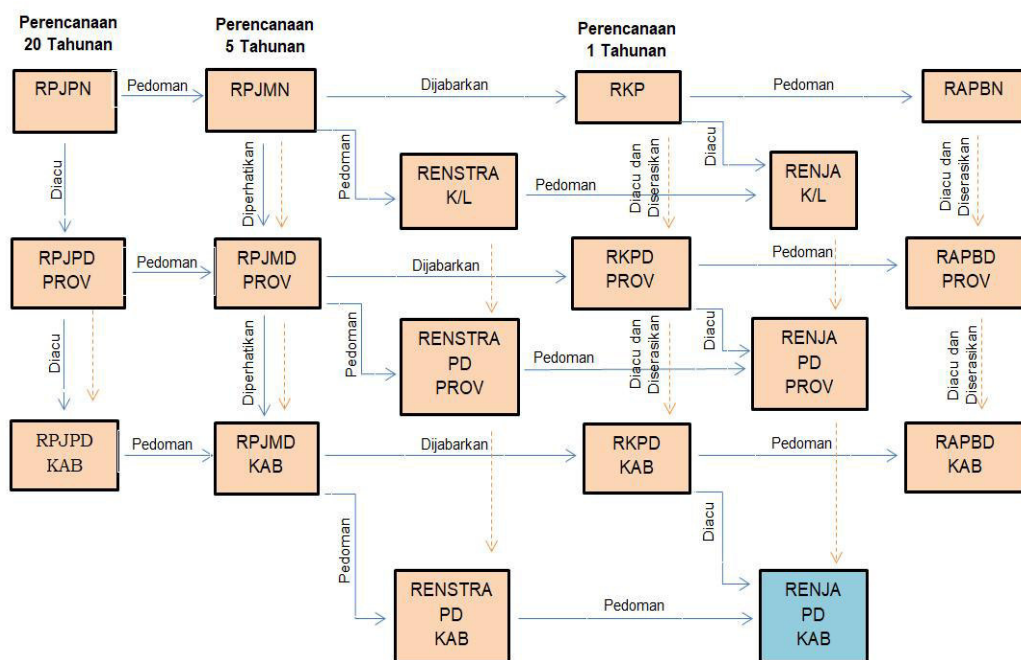
Bappelitbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Bappelitbangda mempedomani Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Bappelitbangda disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029,



Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Renja Bappelitbangda tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Bappelitbangda, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Peggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 18).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renja Bappelitbangda adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bappelitbangda secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Bappelitbangda.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja Bappelitbangda ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Bappelitbangda dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas dan fungsi semua unit kerja pada Bappelitbangda.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappelitbangda Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Bappelitbangda, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappelitbangda, analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda dan sebagainya.



- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup
Berisi ketentuan penutup.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2024 (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Reviu ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2024 dan realisasi Renstra Bappelitbangda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappelitbangda dan realisasi APBD. Dari hasil reviu yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi di atas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappelitbangda. Di samping itu, juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda dan pencapaian Renstra Bappelitbangda disajikan pada tabel 2.1 dihalaman berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda dan
Pencapaian Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah: Bappelitbangda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda) Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d tahun 2025	
					Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= 5+7+9	11 = (10/4)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	94,79%	100%	87,50%	87,50%	100%	94,10%	78,41%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	83,33%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat	100%	75%	100%	0%	0%	100%	58,33%	48,61%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d tahun 2025	
					Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= 5+7+9	11 = (10/4)
		daerah								
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	83,33%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	87,50%	100 %	100%	100 %	100%	95,83%	79,86%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	95,84%	100%	100%	100%	100%	98,61%	82,18%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan	85	91,30	78	85,57	109,71%	80	80	94,12%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	85	98,08	78	79,21	101,55%	80	80	94,12%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi	Indeks kualitas	85	103,54	78	101,77	130,47%	80	80	94,12%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d tahun 2025	
					Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= 5+7+9	11 = (10/4)
	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	perencanaan pada dimensi kelengkapan dan kualitas dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dokumen Perencanaan)								
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi Tindak Lanjut Perencanaan (Konsistensi perencanaan dan penganggaran, capaian kinerja dan serapan anggaran)	85	72,27	78	75,74	97,10%	80	80	94,12%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	85	82,28	78	79,64	102,10%	80	80	94,12%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang pemerintahan	85	91,10	78	84,37	108,17%	80	80	94,12%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d tahun 2025	
					Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= 5+7+9	11 = (10/4)
		dan pembangunan manusia								
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85	77,04	78	77,05	98,78%	80	80	94,12%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85	78,71	78	77,49	99,35%	80	80	94,12%
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah	105	79	85	92	108,24%	95	95	90,48%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Buku Profil Kelitbangan	95 Buku/Profil 1	18 Buku/Profil	15 Buku/Profil 1	1 Buku/Profil 1	13,33%	15 Buku/Profil 1	15 Buku/Profil	35,79%
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penerapan Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	30%	30%	-	-	100%	-	-	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d tahun 2025	
					Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= 5+7+9	11 = (10/4)
		yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah								
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penerapan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	30%	10%	30%	100%	333,33%	-	-	122,22%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya nilai indeks Inovasi Daerah & terfasilitasinya pengembangan inovasi dan teknologi di daerah	1.700	631	1.200	714,97	59,58%	1.500	1.500	88,24%

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota



Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Bappelitbangda selama tahun anggaran 2024, antara lain:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 87,50%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 87,50%. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil dari program ini, karena satu kegiatan yang terdapat dalam program ini tidak tercapai target kinerja keluarannya, yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah.
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 0%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 0%. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran dari kegiatan ini, karena *refocusing* anggaran maka kegiatan ini ditiadakan pada pelaksanaan tahun anggaran tahun 2024
 2. Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78 (indeks), realisasi pencapaian indeks sebesar 75,74 (indeks) sehingga tingkat realisasinya sebesar 97,10%. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran dari kegiatan ini disebabkan oleh:
 - a. Pada saat penginputan capaian masih banyak PD yang belum memiliki nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun berkenaan.
 - b. Capaian nilai IKU dan IKD PD masih belum ada karena variabel perhitungan IKU dan IKD PD bergantung pada *stakeholder* seperti BPS, BPJS dan lain-lain.
 - c. Capaian IKU dan IKD yang sudah ada terdapat beberapa PD yang tidak mencapai target.
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78 (indeks), realisasi pencapaiannya adalah sebesar 77,05 (indeks), sehingga tingkat realisasinya sebesar 98,78%.
 4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78 (indeks), realisasi pencapaiannya adalah sebesar 77,49 (indeks), sehingga tingkat realisasinya sebesar 99,35%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil dari kegiatan-kegiatan di atas disebabkan oleh:

 - a. Pada saat penginputan capaian masih banyak PD yang belum memiliki nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun berkenaan.
 - b. Capaian nilai IKU dan IKD PD masih belum ada karena variabel perhitungan IKU dan IKD PD bergantung pada *stakeholder* seperti BPS, BPJS dan lain-lain.

- c. Capaian IKU dan IKD yang sudah ada terdapat beberapa PD yang tidak mencapai target.

Implikasi yang ditimbulkan terhadap target capaian tersebut menyebabkan realisasi target kinerja keluaran menjadi rendah. Sehingga diharapkan PD lebih proaktif dalam mengirimkan data capaian IKU dan IKD dan lebih aktif berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam penghitungan capaian IKU dan IKD di tahun-tahun berikutnya.

5. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, direncanakan target pencapaian adalah 15 Buku/Profil, realisasi pencapaiannya adalah 1 Buku/Profil sehingga tingkat realisasinya sebesar 13,33%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran dari kegiatan ini dikarenakan dalam rangka efisiensi anggaran, maka *hardcopy* buku/ profil kelitbangan hanya dicetak sebanyak 1 buku/profil. Selebihnya dibagikan dalam bentuk *softcopy* bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Implikasi yang ditimbulkan terhadap capain target kinerja keluaran kegiatan ini menyebabkan realisasi kegiatan menjadi rendah. Sehingga, dalam perencanaan lima tahun kedepan, perlu memperhatikan efisiensi dengan penerapan kebijakan *paper less*.

6. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 1.200 (indeks), namun realisasi pencapaian indeks adalah sebesar 714,97 (indeks) sehingga tingkat realisasinya sebesar 59,58%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran dari kegiatan ini dikarenakan adanya perubahan komponen penilaian, sehingga mempengaruhi batasan skor penilaian, namun secara kriteria targetnya tercapai, yaitu masih dalam *range* Inovatif.

Implikasi yang ditimbulkan terhadap target capaian kegiatan ini adalah realisasi target kinerja keluaran menjadi rendah, dikarenakan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh pusat, yang mana memungkinkan terjadinya perbedaan komposisi penilaian dari tahun ke tahun. Sehingga dalam perencanaan lima tahun kedepan, dalam menetapkan target kinerja hasil/keluaran cukup yang bersifat kriteria (kualitatif).

- II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluarannya, antara lain:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD, direncanakan target pencapaiannya sebesar



- 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan PD, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum PD direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
- III. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Bappelitbangda selama tahun anggaran 2024, antara lain:
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78 (indeks), realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 79,21 (indeks) sehingga tingkat realisasinya sebesar 101,55%. Adapun kegiatan program ini yang melebihi target capaian adalah:
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78 (indeks), realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 79,21 (indeks) sehingga tingkat realisasinya sebesar 101,55%.
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78 (indeks), realisasi pencapaian indeksnya adalah sebesar 101,77 (indeks) sehingga tingkat realisasinya sebesar 130,47%.
 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 79,64, sehingga tingkat realisasinya sebesar 102,10%.

Adapun kegiatan program ini yang melebihi target capaian yaitu:

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, direncanakan target pencapaian indeks sebesar 78, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 84,37, sehingga tingkat realisasinya sebesar 108,17%.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, direncanakan target pencapaian inovasi daerah sebanyak 85 inovasi daerah, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 92 inovasi daerah, sehingga tingkat realisasinya tercapai sebesar 108,24%. Adapun kegiatan program ini yang melebihi target adalah:
- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, pada kegiatan ini di tahun 2024 tidak terdapat target hasil keluaran yang dicapai pada renstra. Namun demikian, capaian target hasil keluaran kegiatan ini telah mencapai 100% pada tahun sebelumnya.
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 30%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 333,33%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024-2025 masih berpedoman pada target yang terdapat di Renstra Tahun 2021-2026. Namun untuk target kinerja tahun 2026-2027 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbangda pada halaman selanjutnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) / Pertumbuhan Ekonomi		IKD			4,62	4,72	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	4,03	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Avalaible</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
2	Angka kemiskinan		IKD			6,65	6,52	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	6,92	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Avalaible</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
3	Jumlah Penduduk Miskin		IKD			26,44	26,16	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	27,72	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Avalaible</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
4	PDRB per kapita (ADHK)		IKD			32,14	32,97	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	32,24	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
5	PDRB per kapita (ADHB)		IKD			47,85	49,68	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	51,98	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
6	Pengeluaran per kapita		IKD			10.140	10.364	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	10.648	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														<i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
7	Indeks Gini		IKD			0,230	0,225	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	0,220	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		IKD			93,35	93,48	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	93,08	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		IKD			70,98	71,36	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	72,51	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i>



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PERENCANAAN PEMBANGUNAN														
10	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		IKD			Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tersedia • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
11	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		IKD			Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tersedia • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
12	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		IKD			Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tersedia • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														tersedia pada Renstra 2025-2029
13	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd		IKD			Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Ada	Ada	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tersedia • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
14	Persentase implementasi rencana kelitbangan		IKD			20	20	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	20	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
15	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		IKD			100	100	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	100	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> • Target Tahun 2026-2027 tidak



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
16	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		IKD			30,23	32,56	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	50	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
17	Persentase kebijakan inovasi yang Diterapkan di daerah.		IKD			23,26	23,26	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	55,88	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Data Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau <i>Not Applicable</i> karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
18	Indeks Inovasi Daerah			√	√	1200 (Terinovatif)	1500 (Terinovatif)	53,04	56,17	714,97 (Inovatif)	Tidak Tersedia	53,04	56,17	<ul style="list-style-type: none"> Data sampai Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target 2026-2027 Berdasarkan



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
19	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)				√	B	BB	77,50	77,75	BB	Tidak Tersedia	77,50	77,75	<ul style="list-style-type: none"> Data sampai Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target 2026-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
20	Indeks Kualitas Perencanaan					78	80	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	79,13	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Data sampai Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target 2026-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
21	Jumlah Inovasi Daerah					85	95	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	92	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Data sampai Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target 2026-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					91,97	93,96	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	91,97	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Data sampai Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target 2026-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
23	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	100	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	100	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Data sampai Tahun 2025 tidak tersedia atau <i>Not Available</i> Target 2026-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
24	Persentase Hasil Kelibngan yang Termanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan		IKK		√	Tidak Tersedia	8%	10%	12%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	10%	12%	Target Tahun 2025-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
25	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)				√	Tidak Tersedia	80	81	82	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	81	82	Target Tahun 2025-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/IKK	IKU KD	IKU KEPALA PD (BAPPELITBANGDA)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2025-2029
26	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti <i>Kabupaten Lima Puluh Kota</i>				√	Tidak Tersedia	8%	10%	12%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	10%	12%	Target Tahun 2025- 2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappelitbangda terhadap *stakeholdersnya*;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Kinerja pelayanan Bappelitbangda pada tahun 2024 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Aplikasi SIPD RI.
Penerapan aplikasi SIPD RI untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya Bappelitbangda dalam peningkatan pelayanan pada *stakeholders*. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini maka, penyusunan perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat terlaksana;
2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan PD seperti melalui *Whatsapp group*;
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi lingkup masing-masing bidang di Bappelitbangda. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat turut ditingkatkan;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda untuk meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum konsistennya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan musrenbang mulai dari tingkat nagari sampai Kabupaten dan penyelenggaraan Forum PD;
5. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to*

- date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
6. Masih belum meratanya kemampuan sumber daya manusia/aparatur perencana di Bappelitbangda.

Hambatan dan persoalan di atas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Bappelitbangda merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi dengan tujuannya adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Merunut pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa mendatang, tantangan yang dihadapi Bappelitbangda dalam beberapa tahun mendatang adalah:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
3. Meningkatkannya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

Sedangkan peluang bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Menjadikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal.

Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah ujung tombak dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai dengan perundangan yang berlaku, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu-isu strategis yang tengah dihadapi oleh Bappelitbangda saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kualitas dan Kapasitas SDM Bappelitbangda yang masih perlu ditingkatkan;



3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Masih belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat PD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;
6. Belum terakomodirnya secara maksimal usulan-usulan yang bersifat *bottom up*.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya, terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Proses reviu terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun perencanaan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra PD dengan memperhatikan kebutuhan yang berkembang secara rasional. Pada tabel di bawah ini akan terlihat bahwa terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan terdapat pada beberapa target sub kegiatan dan adanya penyesuaian kebutuhan pendanaan. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam tabel 2.3 pada halaman berikut ini:

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PERENCANAAN										
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.194.188.885	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.194.279.769	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	102.581.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	102.581.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	11.604.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.604.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	5.802.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	5.802.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.599.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.599.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.581.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.324.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	2.324.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	2.581.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			DPA-SKPD					DPA-SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	66.942.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	66.942.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.729.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.729.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	4.500.798.811	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	4.500.798.235	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.470.651.235	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4.470.651.235	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.741.576	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.741.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.802.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.802.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	12 laporan	5.802.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	12 laporan	5.802.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.802.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.802.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	12.860.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	12.860.000	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.860.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.860.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	90.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	55.000.000	
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 Paket	90.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas	70 Paket	55.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Atribut Kelengkapannya		beserta Atribut Kelengkapan			Atribut Kelengkapannya		beserta Atribut Kelengkapan			
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	378.092.074	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	381.290.534	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	10.660.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	10.660.000	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.030.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.030.000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	52.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	52.700.400	
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82.051.074	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82.249.134	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.400.000	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.005.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.005.000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	185.246.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	185.246.000	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	419.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	416.393.000	
22	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	5 Unit	147.036.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Disediakan					Disediakan			
23	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	99.941.000	
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	169.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	169.416.000	
25	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	371.947.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	371.947.000	
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	83.947.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	83.947.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	288.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	288.000.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	318.410.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	353.410.000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12 unit	236.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12 unit	236.700.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	51.710.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	51.710.000	
32	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	65.000.000	Diperlukan pemeliharaan gedung kantor
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan lain
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan	85 Indeks	414.436.476	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan	85 Indeks	414.426.276	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	296.657.500	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	296.647.300	
35	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Awal (RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	0	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Awal (RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	0 Dokumen	0	
36	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	36.869.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	36.869.000	
38	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0 Berita Acara	0	
39	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Ksbupaten/Kota	1 Berita Acara	40.062.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Ksbupaten/Kota	1 Berita Acara	40.052.000	
40	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2370 Usulan	15.620.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	790 Usulan	15.620.000	
41	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	204.106.500	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	204.106.300	
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks kualitas perencanaan	85%	70.144.976	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks kualitas perencanaan	85%	70.144.976	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		pada dimensi kelengkapan dan kualitas dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dokumen Perencanaan)			Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		pada dimensi kelengkapan dan kualitas dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dokumen Perencanaan)			
42	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	1 Dokumen	0	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	1 Dokumen	23.762.976	Diperlukan dokumen hasil analisis data
43	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0 Orang	70.144.976	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	43 Orang	46.382.000	
44	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	0	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0 Buku	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi Tindak Lanjut Perencanaan (Konsistensi perencanaan dan penganggaran, capaian kinerja dan serapan anggaran)	85%	47.634.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi Tindak Lanjut Perencanaan (Konsistensi perencanaan dan penganggaran, capaian kinerja dan serapan anggaran)	85%	47.634.000	
45	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	10.045.000	Diperlukan laporan hasil pengendalian dan pelaksanaan pembangunan
46	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama Daerah	0	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0 Kerja Sama Daerah	0	
47	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	1 Laporan	47.634.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	2 Laporan	37.589.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Daerah		Daerah			Pembangunan Daerah		Daerah			
C	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab Lima Puluh Kota	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perencanaan	85 Indeks	798.662.774	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab Lima Puluh Kota	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perencanaan	85 Indeks	778.582.278	
XII	Kegiatan Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	85%	348.058.496	Kegiatan Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	85%	348.000.000	
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	70.000.000	
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	30.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	0 Laporan	0	Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan lain



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pemerintahan		Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Pemerintahan		Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	20.058.496	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0	Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan lain
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	48.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	78.000.000	
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	50.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			RKPD)					RKPD)			
53	Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	30.000.000	Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0	Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan lain
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	30.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 laporan	0	Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan lain
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Kab Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada	1 Laporan	150.000.000	0



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Bidang Pembangunan Manusia			Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Bidang Pembangunan Manusia			
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	189.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	168.978.000	
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	93.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	92.978.000	
57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1 Laporan	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	0 Laporan	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Perekonomian					Perekonomian			
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	0	
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	96.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	76.000.000	
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Daerah Bidang SDA					Daerah Bidang SDA			
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	0	
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	261.604.278	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Lima Puluh Kota	Indeks Kualitas Perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	261.604.278	
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	58.302.139	Diperlukan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			RKPD)					RKPD)			
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	58.302.139	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan lain
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	72.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	72.500.000	Diperlukan laporan sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	58.302.139	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0	
68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	58.302.139	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0	Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan lain
69	Koordinasi	Kab. Lima	Jumlah	1 Laporan	72.500.000	Koordinasi	Kab. Lima	Jumlah	1 Laporan	72.500.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Puluh Kota	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan			Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Puluh Kota	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	10%	95.906.588	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	10%	115.906.200	
XV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Buku Profil Kelitbangan	15 Buku/Profil	95.906.588	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Buku Profil Kelitbangan	15 Buku/Profil	63.999.000	
70	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi,	1 Laporan	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi,	0 Laporan	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
71	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	95.906.588	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	63.999.000	
72	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
73	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan	1 Laporan	0	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan	0 Laporan	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Pengkajian Peraturan					Pengkajian Peraturan			
XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penerapan Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	30%	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penerapan Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	0%	0	
74	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	1 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	0 Dokumen	0	
75	Penelitian dan Pengembangan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 Dokumen	0	
76	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil	0 Dokumen	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Olahraga		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga			Olahraga		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga			
77	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0	
78	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	0	
XVI I	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penerapan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah Dilaksanakan Pada Perangkat Daerah	30%	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penerapan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah Dilaksanakan Pada Perangkat Daerah	30%	51.907.200	
79	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan	1 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan	1 Dokumen	51.907.200	Diperlukan dokumen hasil penelitian di bidang pertanian



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			dan Pangan					dan Pangan			
80	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	0	
81	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	
82	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	0	
83	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	0 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	0 Dokumen	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Perumahan dan Kawasan Pemukiman					Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
XVI II	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya nilai indeks Inovasi Daerah & terfasilitasinya pengembangan inovasi dan teknologi di daerah	1.700	0	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya nilai indeks Inovasi Daerah & terfasilitasinya pengembangan inovasi dan teknologi di daerah	0	0	
84	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	0	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0 Laporan	0	
85	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	0	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	JUMLAH				7.503.194.7 23	JUMLAH				7.503.194. 523	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Bappelitbangda tahun 2026 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Bappelitbangda tidak memperoleh usulan secara langsung melalui musrenbang, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Bappelitbangda, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja PD terkait. Sehubungan dengan keadaan di atas, maka tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 tidak ada penjelasannya atau nihil.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renja PD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa penelaahan ini harus mencakup arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD. Dalam konteks penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, telaahan ini menjadi dasar untuk memastikan adanya sinkronisasi vertikal antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, sehingga arah, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN, RPJMN, serta Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

RPJPN Tahun 2025–2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menjadi pedoman utama bagi seluruh tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045”. RPJPN tersebut mengusung empat agenda transformasi besar, yaitu transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan ekologi yang menuntut pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan di wilayahnya. Dalam hal ini, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran strategis dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam konteks lokal, terutama dalam memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan berbasis data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi daerah, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 agar mendukung transformasi menuju daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat RPJPN.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan tahap pertama RPJPN. RPJMN menekankan pentingnya penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Bagi Bappelitbangda, substansi RPJMN tersebut sangat relevan terutama dalam memastikan integrasi program dan kegiatan daerah dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, peningkatan konektivitas wilayah pedesaan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Selain itu, RPJMN juga menegaskan pentingnya transformasi digital pemerintahan dan penguatan sistem perencanaan berbasis data sebagai instrumen utama dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan



Daerah (SIPD), penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) guna memastikan konsistensi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025–2029 yang menjadi turunan operasional dari RPJMN mengarahkan fokus pada penguatan koordinasi perencanaan lintas sektor dan wilayah, peningkatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas evaluasi kebijakan publik. Meskipun dokumen Renstra Bappenas masih dalam proses finalisasi penetapan, arah kebijakan yang diusungnya menuntut peran aktif Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai simpul koordinasi pembangunan di tingkat daerah. Bappelitbangda perlu memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perencana, memperluas kolaborasi dengan lembaga penelitian dan akademisi, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Melalui sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda dalam Renja Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran PD adalah suatu tahapan yang penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah dari PD. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda pada tahun 2025-2029 memiliki 2 (dua) Tujuan, 3 (tiga) Indikator tujuan, 3 (tiga) Sasaran, dan 5 (lima) Indikator Sasaran sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- I. Tujuan Pertama adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah indikator tujuan yaitu:



- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
- b. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy/EBP*)

Adapun Sasaran pada Tujuan Pertama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda dengan indikator sasaran yaitu :
 - a. Nilai SAKIP Bappelitbangda.
2. Sasaran Kedua adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran yaitu :
 - b. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
3. Sasaran Ketiga adalah Meningkatkan Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran yaitu :
 - c. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah
 - d. Indeks Inovasi Daerah

Berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda pada Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.1 di halaman selanjutnya.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Bappelitbangda pada Tahun 2025-2029

No	NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Bappelitbangda	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	NSPK: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80	81	82	83	84	85	
				Indikator 2: Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy/EBP</i>)	8%	10%	12%	14%	16%	18%	
2			Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	77,25	77,50	77,75	78,00	78,25	78,50	
			Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80	81	82	83	84	85	
3											



No	NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Bappelitbangda	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Permendagri No. 17 Tahun 2016 Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Sasaran RPJMD: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Sasaran 3: Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indikator 1: Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	8%	10%	12%	14%	16%	18%	
5				Indikator 2: Indeks Inovasi Daerah	49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57	
6											

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota



3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Bappelitbangda yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan program/kegiatan pada Rencana Kerja Bappelitbangda adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Bappelitbangda erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-2, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 4 program Bappelitbangda sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Program dan kegiatan di Bappelitbangda dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. Program dan kegiatan pada setiap PD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan;
3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan penelitian dan pengembangan.

Ringkasan program dan kegiatan Bappelitbangda pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap PD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Pelaksanaan Konsultasi Publik 2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 3. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
		3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Koordinasi



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			<p>Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>
		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<p>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>
		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</p>

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3.4



Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2026 Bappelitbangda melaksanakan 4 program dengan 16 kegiatan dan 49 sub kegiatan.

Sebagai PD yang memiliki peran strategis dalam bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota tidak secara langsung melaksanakan Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Peran Bappelitbangda lebih difokuskan pada fungsi koordinasi, fasilitasi, serta sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah teknis, sehingga program prioritas dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Bappelitbangda tidak memiliki daftar Sub Kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 3.5 berikut keterangan yang dicantumkan adalah NIHIL.



Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda
Pendukung Prioritas Kabupaten

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		NIHIL		

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Namun demikian, meskipun tidak melaksanakan Sub Kegiatan prioritas secara langsung, Bappelitbangda memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi penganggaran, serta efektivitas evaluasi pembangunan. Melalui fungsi koordinatif tersebut, Bappelitbangda menjadi penggerak utama dalam mengarahkan PD teknis agar pelaksanaan program prioritas daerah dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun mengenai uraian Sub Kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Bappelitbangda Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.6 pada halaman selanjutnya.

Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					7.503.194.523				7.888.794.690
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.503.194.523				7.888.794.690
5.01	PERENCANAAN				7.387.288.323				7.788.092.773
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	6.194.279.769			100 %	6.417.717.650
5.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel /	100 %	6.194.279.769	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	102.581.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Desa			Umum			
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100 %	4.500.798.235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	4.724.327.576
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100 %	12.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	12.860.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100 %	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	90.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel /	100 %	381.290.534	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	378.092.074



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Desa			Umum			
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100 %	416.393.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	419.500.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100 %	371.947.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	371.947.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	100 %	353.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	100 %	318.410.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100%	414.426.276			85 Indeks	500.925.123



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%					
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	85 %	296.647.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	85 %	326.323.250
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan pada Dimensi Kelengkapan dan Kualitas Dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dok. Perencanaan)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	85 %	70.144.976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	85 %	117.159.473
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan pada Dimensi Tindak Lanjut Perencanaan (Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran,	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	85 %	47.634.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda	85 %	57.442.400



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran)							
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan		100%	778.582.278			85 Indeks	869.450.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	85 %	348.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda, Kabupat en Sehat ,K LA	85 %	383.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel /	85 %	168.978.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	IKU Kepala Bappelit bangda	85 %	198.450.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Alam)	Manusia)	Desa			Umum			
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	85 %	261.604.278	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Bappelit bangda, Kabupaten Sehat	85%	288.000.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				115.906.200				100.701.917
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah		10%	115.906.200			12%	100.701.917
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah Buku Profil Kelitbangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan,	15 Buku/ Profil	63.999.000	Dau yang Ditentukan	IKU Kepala Bappelit bangda	15 Buku/ Profil	100.701.917



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengkajian Peraturan		Semua Kel / Desa			Penggunaannya Bidang Pendidikan			
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penerapan Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Telah Dilaksanakan pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	30 %	0	Dau yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	IKU Kepala Bappelit bangda, Penanganan Stunting , Kepemudaan, P3KE dan PUG	0 %	0
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penerapan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Telah Dilaksanakan pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	30 %	51.907.200	Dau yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0 %	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						an			
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Nilai Indeks Inovasi Daerah & Terfasilitasinya Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	1700	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU Kepala Daerah	1700	0
JUMLAH						7.503.194.523			7.888.794.690

Sumber: Bappelibangda Kabupaten Lima Puluh Kota



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Bappelitbangda Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Bappelitbangda tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2026 dikelompokkan dalam 2 Urusan, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan 4 Program, 16 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.4 pada bab III sebelumnya. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada tabel 4.1 di halaman selanjutnya:



TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						7.503.194.523,00								7.888.794.690,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.503.194.523,00								7.888.794.690,00	
	5.01	PERENCANAAN						7.387.288.323,00								7.788.092.773,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 %	6.194.279.769,00						-	6.417.717.650,00		
		[Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 %	102.581.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATOB ERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	102.581.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	11.604.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATOB ERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		11.604.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATOB ERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.599.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATOB ERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		6.599.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.324.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		2.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.581.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		2.581.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	66.942.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		66.942.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	6.729.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		6.729.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	4.500.798.235,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	4.724.327.576,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				42 Orang/bulan	4.470.651.235,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		4.694.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	12.741.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		12.741.576,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	12.860.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	12.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	12.860.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		12.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	55.000.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	381.290.534,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	378.092.074,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	10.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	11.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		11.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	52.700.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		52.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	85.249.134,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		82.051.074,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		11.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	25.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		25.005.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				24 Laporan	185.246.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		185.246.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan</i>	-			100 %	416.393.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	419.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	147.036.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	99.941.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	169.416.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		169.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	371.947.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	371.947.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	83.947.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		83.947.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	288.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			.100 %	353.410.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	318.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	236.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		236.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	51.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		51.710.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Indeks kualitas perencanaan</i>	-			85 Indeks	414.426.276,00						-	500.925.123,00	
		[Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	- 100	100	100 100	414.426.276,00	-	-	-	-	-	-	500.925.123,00	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Indeks Kualitas Perencanaan</i>	-			85 %	296.647.300,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	326.323.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	36.869.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		40.555.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	40.052.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		44.068.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>				790 Usulan	15.620.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		17.182.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				2 Dokumen	204.106.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kabupaten Lima Puluh Kota		224.517.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Indeks Kualitas Perencanaan pada Dimensi Kelengkapan dan Kualitas Dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dok. Perencanaan)</i>	-			85 %	70.144.976,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	117.159.473,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	23.762.976,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				43Orang	46.382.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		77.159.473,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Indeks Kualitas Perencanaan pada Dimensi Tindak Lanjut Perencanaan dan Penganggaran, Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran)</i>	-			85 %	47.634.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	57.442.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	10.045.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		15.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				2 Laporan	37.589.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		42.397.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Indeks kualitas perencanaan lingkup bidang koordinasi perencanaan</i>	-			85 Indeks	778.582.278,00						-	869.450.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	100	100	100	100	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			85 %	348.000.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	383.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	100	100	100	100	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	78.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	100	100	100	100	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)</i>	-			85 %	168.978.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	198.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	92.978.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		97.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			85 %	261.604.278,00			-	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>				1 Dokumen	58.302.139,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		64.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan]	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	100	100	100	100	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	72.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>				1 Dokumen	58.302.139,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		64.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	100	100	100	100	778.582.278,00	-	-	-	-	-	-	869.450.000,00	-
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	72.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						115.906.200,00							100.701.917,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			10	115.906.200,00						-	100.701.917,00	
		[Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah]	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	18	-	8	10	115.906.200,00	-	-	-	-	-	-	100.701.917,00	-
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			1 Laporan	63.999.000,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	100.701.917,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>				1 Laporan	63.999.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.701.917,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			1 Dokumen	51.907.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>				1 Dokumen	51.907.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
J U M L A H								7.503.194.523,00							7.888.794.690,00	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

No	Bidang Urusan	2026			2027			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perencanaan	3	14	7.387.288.323	3	14	7.788.092.773	
2	Penelitian dan Pengembangan	1	2	115.906.200	1	1	100.701.917	
TOTAL		4	16	7.503.194.523	4	15	7.888.794.690	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Bappelitbangda Tahun 2026. Renja Bappelitbangda Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Bappelitbangda Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Bappelitbangda sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yakni penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, penyusunan Renja Bappelitbangda juga mempedomani hasil evaluasi hasil Renja Bappelitbangda tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Bappelitbangda tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Bappelitbangda tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappelitbangda.

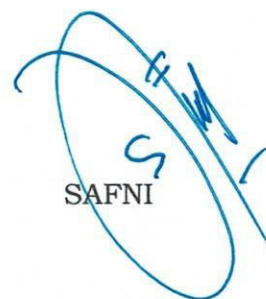
Renja Bappelitbangda Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antardokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Renja Bappelitbangda memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappelitbangda sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan Bappelitbangda. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di Bappelitbangda. Dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Bappelitbangda dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 050/437/BUP-LK/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 050/45/BUP-LK/ XII /2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Anggota
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Pranata Humas	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	Anggota
	Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi	Anggota
	Fungsional Sanitarian	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang	Anggota
	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Penera	Anggota
	Fungsional Analisis Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ketua
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Fungsional Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhortbun	Ketua
	Sekretaris Distanhortbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengawas Benih	Anggota
	Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Fungsional Umum	Anggota
21. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/ Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
22. DINAS PERIKANAN		
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23. DINAS PANGAN		
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Pangan	
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Arsiparis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Kepala Bappelitbangda	Ketua
	Sekretaris Bappelitbangda	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Program Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Keuangan Bappelitbangda	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi	Anggota
	Pelaksana pada Bappelitbangda	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksanaan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limu Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limu Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limu Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO